



NOTA DINAS

NOMOR 60 /IJ-IND.2/KP/IV/2025

Yth. : Inspektur Jenderal
D a r i : Inspektur I
Hal : Penyampaian Laporan PP39 Triwulan I 2025 Inspektorat I
Tanggal : 6 April 2025

Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian, bersama kami lampirkan Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I tahun 2025.

Secara umum gambaran pencapaian kinerja Inspektorat I melalui pelaksanaan program dan kegiatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I pada Kinerja Triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran pada Triwulan I mencapai 14,37% atau Rp359.133.082 dari anggaran total pagu Rp2.500.000.000 dan apabila mengesampingkan pagu blokir sebesar Rp1.500.000.000 capaian realisasi sampai saat ini 35,91%;
2. Pada Triwulan I, kegiatan yang telah disusun telah berjalan sesuai dengan rencana;
3. Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan II (April-Juni) adalah sebagai berikut:
 - a) Penilaian SAKIP UPT pada BPSDMI;
 - b) Audit kinerja pada BDI Denpasar, Politeknik ATI Padang, SMK - SMAK Padang, BDI Padang, dan SMK - SMTI Padang;
 - c) Audit kinerja pada Politeknik PTKI Medan, BDI Medan, Politeknik IFPK Kendal, SMK – SMTI Pontianak, SMK - SMTI Banda Aceh, dan BDI Surabaya.

Demikian, atas perkenan dan arahan Bapak Inspektur Jenderal Lebih lanjut disampaikan terima kasih.

Inspektur I, 

Dewi Setiawati

Tembusan:
Sekretaris Inspektorat Jenderal.



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN
PENGENDALIAN DAN
EVALUASI
PELAKSANAAN
RENCANA
PEMBANGUNAN
INSPEKTORAT I
TAHUN 2025**

**INSPEKTORAT I
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAKARTA, April 2025**

**LAPORAN RENCANA DAN CAPAIAN KEGIATAN
INSPEKTORAT I
TRIWULAN I
TAHUN 2025**



**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAKARTA, April 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya Inspektorat I dapat menyelesaikan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2025.

Dasar hukum penyusunan laporan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 mengenai Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Laporan ini dibuat untuk melihat besaran sasaran keuangan dan fisik yang telah dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Inspektorat I Kementerian Perindustrian selama Triwulan I Tahun 2025.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Inspektorat I atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya membantu Inspektorat Jenderal dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang pengawasan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian.

Melalui laporan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran obyektif tentang capaian kinerja Inspektorat I periode Triwulan I Tahun 2025. Laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan dalam merencanakan atau melaksanakan pada periode berikutnya.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, kami sampaikan terima kasih. Semoga laporan ini bermanfaat.

Jakarta, April 2025

Inspektur I



Dewi Setiawati

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Tugas Pokok dan Fungsi	1
B. Latar Belakang Kegiatan/Program	2
C. Struktur Organisasi	3
BAB II : RENCANA PROGRAM/KEGIATAN	6
A. Program/Kegiatan Tahun 2025	6
B. Sasaran dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan	8
BAB III : PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN	13
A. Capaian Kinerja TW I TA 2025	13
B. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	15
C. Analisis Capaian Kinerja	19
D. Hambatan dan Kendala	24
E. Tindak Lanjut	25
BAB IV : PENUTUP	26
A. Kesimpulan	26
B. Saran	26
LAMPIRAN : LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN I INSPEKTORAT I TAHUN ANGGARAN 2025	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sebagai unit kerja pengawasan internal memiliki peran mendorong pencapaian tujuan dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas organisasi serta mencegah terjadinya penyimpangan, pemborosan, dan penyelewengan dari unit-unit kerja dilingkungan Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

Adapun cakupan satuan kerja Inspektorat I terdiri dari 2 unit kerja pusat yaitu Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) dengan 28 satuan kerja vertikal yaitu 9 satuan kerja SMK, 12 satuan kerja Politeknik dan 7 satuan kerja Balai Diklat Industri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

3. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Internal di lingkungan Kementerian Perindustrian, dalam pelaksanaan Pengawasan Internal, Inspektorat I bertanggungjawab pada cakupan tugasnya untuk:

1. Melaksanakan kegiatan asuransi dan memberikan pendapat atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal;
2. Memberikan konsultasi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola manajemen risiko dan pengendalian internal baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan eselon I;
3. Melaksanakan pendampingan terhadap unit eselon I yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan BPKP, baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan unit eselon I;
4. Melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian.

B. Latar Belakang Kegiatan/Program

Agar fungsi pengawasan tersebut dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program kegiatan tahun 2025 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan ditempuh.

Pelaksanaan kegiatan/program dilatarbelakangi oleh kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dalam tahun 2025 adalah :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, dimana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja).
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Sedangkan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja audit;
2. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan serta pengembangan industri;
3. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
4. Meningkatkan profesional aparat pengawasan;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
6. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal;
7. Menerapkan audit berbasis resiko.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat I terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh pejabat eselon I yang mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran,

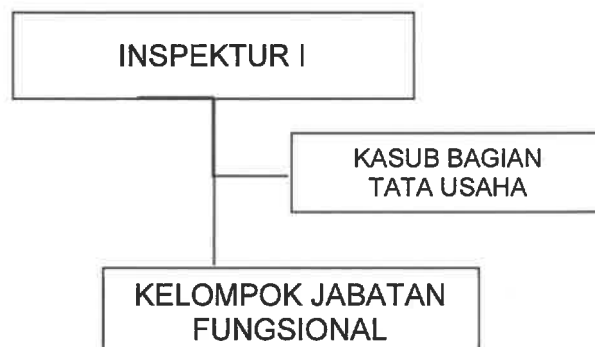
evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur;

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat I Kementerian Perindustrian sebagai berikut:



Bagan struktur organisasi Inspektorat I terdiri dari

1. Inspektur I;
2. Subbagian Tata Usaha;

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh pejabat eselon I yang mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga Inspektorat I;

3. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah auditor pada Inspektorat I sebanyak 15 orang terdiri dari:

- a. Auditor Utama : 1 orang;
- b. Auditor Madya : 3 orang;
- c. Auditor Muda : 6 orang;
- d. Auditor Pertama : 5 orang.

BAB II

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

A. Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Program Inspektorat Jenderal adalah "Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian", dan kegiatan Inspektorat I adalah **Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindtrian Cakupan Tugas Inspektorat I** dengan kegiatan kerja pada Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 1. Layanan Pengawasan Internal Inspektorat I Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
1.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2 Laporan
2.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Laporan
3.	Layanan Audit Internal	194 Laporan
	Audit Program dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I	31 Laporan
	Reviu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I	109 Laporan
	Monitoring dan Evaluasi Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I	39 Laporan
	Konsulting dan Pengawalan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I	15 Laporan

Dalam melaksanakan program/kegiatan tersebut Inspektorat I pada tahun 2025 memiliki anggaran sebesar Rp 2.500.000.000,- namun s/d bulan Desember 2025 telah ditetapkan untuk dilakukan blokir mandiri sebesar Rp. 1.500.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Alokasi Anggaran Inspektoral I Tahun 2025

Kode	Uraian	Anggaran	Volume Output	Satuan Output	Detail Output
1841	Pengawasan Efektifitas, Efisiensi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/ Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektoral I		201	Laporan	
1841.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2.500.000.000			1. 1 (satu) Dokumen Usulan PKPT Inspektoral I
1841.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4.000.000	2	Lap	2. 1 (satu) Dokumen Usulan KAK dan RAB Inspektoral I
					3. 1 (satu) Dokumen Usulan Perencanaan (Perkin/ Renja/Resiko/ Tindak Lanjut)
					4. 1 (satu) Dokumen Usulan Program Pengawasan/ Pedoman
1841.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	116.311.000	5	Lap	1. 4 (empat) Laporan PP39 TW I, I, II, Inspektoral I
					2. 1 (satu) Dokumen LAKIP Inspektoral I
1841.TBD.965	Layanan Audit Internal	1.379.689.000	194	Lap	1. 19 (sembilan belas) LHA pada 19 (sembilan belas) KPA
					2. 1 (satu) LHA Pusat
					3. 5 (lima) Laporan TLHP 5 (lima) Regional
					4. 6 (enam) LHR PIPk 6 (enam) satker
					5. 31 (Tiga puluh satu) LHR Semester I pada 31 (tiga puluh satu) Satker
					6. 31 (Tiga puluh satu) LHR Semester II pada 31 (tiga puluh satu) Satker
					7. 39 (tiga puluh sembilan) LHR perencanaan pada 39 (tiga puluh sembilan) KPA
					8. 2 (dua) LHR RK-BMN pada 2 (dua) unit Eselon I
					9.38 (tiga puluh delapan) LHE SAKIP pada 38 unit kerja vertikal
					10. 1 (satu) Laporan Monev Kesiapan BDI
					11. 5 (lima) Laporan Pendampingan MRI pada 5 (lima) Region
					12. 7 (tujuh) Laporan Pendampingan Inspektoral I pada 7 (tujuh) Kegiatan Beresiko di lingkungan BP-SDMI dan Sekretariat Jenderal
					13. 12 (dua belas) Laporan Bulanan Pembinaan dan Pengawasan Inspektoral I

B. Sasaran dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Inspektorat I yang dilaksanakan pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4. Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat I

KODE	SASARAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN		TARGET	SATUAN
TJ	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Inspektorat I	1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Cakupan Tugas Inspektorat I	0,5	Indeks
		2	Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan (audit) Internal Tahun 2024 Cakupan Tugas Inspektorat I	80	Indeks
		3	Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan (audit) Internal Tahun 2015-2023 Cakupan Tugas Inspektorat I	20	Indeks
		4	Nilai SAKIP	79,5	Indeks
		5	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	61	Indeks
		6	Tingkat Penerapan SPBE	80	Indeks
		7	Presentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan / atau Jasa Pemerintah	91	Indeks

RENCANA AKSI INSPEKTORAT I TAHUN 2025

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA KERJA	TARGET	KEGIATAN UTAMA	TARGET			
							TW I	TW II	TW III	TW IV
Sasaran Kegiatan										
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Inspektorat I	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat I	0,05%	Terselenggaranya Audit Kinerja pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal	Kuantitas	Audit Kinerja pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal	25%	25%	25%	25%
				Terselenggaranya Reviu pada Satuan Kerja BPSDMI dan Sekretariat Jenderal	Kuantitas	Reviu pada Satuan Kerja BPSDMI dan Sekretariat Jenderal	25%	25%	25%	25%
				Terselenggaranya penilaian SAKIP unit kerja pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal	Kuantitas	Penilaian SAKIP unit kerja pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal	25%	25%	25%	25%
				Terselenggaranya pendampingan kegiatan beresiko Tahun berjalan pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal	Kuantitas	Pendampingan kegiatan beresiko Tahun berjalan pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal	25%	25%	25%	25%
			80	Terselenggaranya Monitoring Kesiapan BDI menuju Corporate University	Kuantitas	Monitoring Kesiapan BDI menuju Corporate University	25%	25%	25%	25%
				Terselenggaranya tindak lanjut secara efektif dan efisien untuk memperbaiki kelemahan sistem dan meningkatkan kinerja pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal	Kuantitas	Penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut yang Sistematis	25%	25%	25%	25%
		Penyelesaian Rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2024 Cakupan Tugas Inspektorat I	20	Terselenggaranya Monitoring Tindak Lanjut pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal	Kuantitas	Monitoring Tindak Lanjut pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal	25%	25%	25%	25%

	Nilai SAKIP	79,5	Meningkatkan kualitas perencanaan Kinerja, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	Prosentase	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja	25%	25%	25%	25%
	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	61	Mewujudkan tata kelola arsip yang tertib dan sistematis	Prosentase	Menyusun SK dan SOP Pengelola Arsip	25%	25%	25%	25%
	Tingkat Penerapan SPBE	80%	Penguatan kebijakan dan tata kelola SPBE	Kuantitas	Memverifikasi dan pengumpulan dokumen pendukung evaluasi SPBE	25%	25%	25%	25%
	Presentase nilai capaian Penggunaan Produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Inspektorat I	91%	Penggunaan PDN dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat I	Prosentase	Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat I melalui akun 524111,524113,521211,521211,521811	25%	25%	25%	25%

RENCANA KERJA TRIWULAN I

Sasaran kegiatan	Indikator kinerja	Target kinerja				1841	Resiko utama	Anggaran	RENCANA PENARIKAN ANGGARAN			
		TW1	TW2	TW3	TW4				TW1	TW2	TW3	TW4
Perspektif pemangku kepentingan												
Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program kementerian perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja tugas Inspektorat i	-	-	-	0,05%	1. Pelaksanaan audit kinerja		773.686.000	25%	25%	25%	25%
						2. Reviu LK/ BMN		2.300.000	25%	25%	25%	25%
						3. Reviu PIPK		-	25%	25%	25%	25%
						4. Reviu RKA-K/L		-	25%	25%	25%	25%
						5. Reviu RK-BMN		-	25%	25%	25%	25%
						6. Manjemen resiko		-	25%	25%	25%	25%
						7. Evaluasi sampil		21.700.000	25%	25%	25%	25%
						8. Pengawasan Program Dan Kegiatan Berisiko Tinggi Tahun Berjalan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat i		196.614.000	25%	25%	25%	25%
						9. Penyusunan Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Inspektorat I		5.700.000	25%	25%	25%	25%
	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya											

Sebagaimana tertuang dalam tabel diatas, seluruh sasaran program tersebut telah tertuang dalam perjanjian kinerja Inspektorat I Tahun 2025. Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran tersebut dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah tertuang dalam DIPA Inspektorat I, yang dapat dilaksanakan melalui:

1. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian
Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan:
 - a. Audit Internal
 - Melaksanakan audit kinerja pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
 - Melaksanakan audit khusus dengan penugasan Menteri pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
 - b. Reviu
 - Melaksanakan reviu LK-BMN pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
 - Melaksanakan reviu PIPK pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
 - Melaksanakan reviu anggaran pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
 - c. Monitoring
 - Melaksanakan penilaian SAKIP unit Eselon II dan UPT pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
 - Monitoring kesiapan BDI dalam rangka menuju Corporate University
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan pendampingan implementasi manajemen resiko, sosialisasi, dan pembinaan pengawasan
3. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif
Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan;
4. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan dan menerapkan penjaminan kualitas yang memadai

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN

A. Capaian kinerja Triwulan I TA 2025

Berikut merupakan capaian kinerja Inspektorat I TA 2025 berdasarkan masing-masing indikator kinerja utama (IKU):

Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian

- 1) Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal
Batas toleransi temuan pengawasan eksternal adalah jumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tiap-tiap satker cakupan tugas Inspektorat I yang bersifat keuangan dibandingkan dengan total satker. Realisasi indikator kinerja ini menggunakan data hasil pemeriksaan BPK, sehingga frekuensi pengukuran indikator kinerja ini bersifat tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* (semakin kecil lebih baik). pada triwulan ini belum dapat dihitung dikarenakan masih dalam proses pemeriksaan BPK.
- 2) Penyelesaian Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat I;
Berdasarkan PKPT Inspektorat I pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dalam 90 (sembilan puluh) hari dapat digambarkan dalam tabel berikut:

No	Satuan Kerja	Surat Pernyataan Kesanggupan Menindaklanjuti	Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
1	SMK SMAK Bogor	Ada	Ada
2	SMK SMTI Bandar Lampung	Ada	Ada
3	Politeknik STTT Bandung	Ada	Ada
4	Politeknik AKA Bandung	Ada	Ada
5	Akom ITPT Surakarta	Ada	Ada
6	Politeknik ATK Yogyakarta	Ada	Ada
7	SMK SMTI Yogyakarta	Ada	Ada
8	BDI Yogyakarta	Ada	Ada
9	APP Jakarta	Ada	Ada
10	Politeknik STMI Jakarta	Ada	Ada
11	BDI Jakarta	Ada	Ada
12	Politeknik Industri Cilegon	Ada	Ada

*) Satker yang telah membuat kedua dokumen diatas maka dapat dinyatakan telah berupaya melaksanakan tindak lanjut yang dinyatakan dalam IKU dengan status Belum Sesuai Rekomendasi.

Secara perhitungan indikator pada Triwulan I belum dapat dilakukan perhitungan dikarenakan masih dalam proses audit dan satuan kerja masih dalam tahap konfirmasi dengan Tim Audit, perhitungan dapat dilakukan pada awal Triwulan III.

3) Penyelesaian Rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal tahun 2015-2023 Cakupan Tugas Inspektorat I

Sejak tahun 2015 hingga 2023, Inspektorat I telah melaksanakan berbagai kegiatan pengawasan internal yang menghasilkan sejumlah rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait. Namun, berdasarkan hasil monitoring, terdapat rekomendasi yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti. Oleh karena itu, diperlukan strategi percepatan penyelesaian agar tercapai tingkat penyelesaian rekomendasi secara optimal sebagai bagian dari penguatan pengawasan internal dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

4) Nilai SAKIP

Memperbaiki, Meningkatkan dan Mengoptimalkan rencana aksi kinerja agar digunakan sebagai dasar evaluasi dengan analisis mengidentifikasi hambatan dan merumuskan solusi, memastikan semua dokumen perencanaan kinerja dipublikasikan tepat waktu dan dapat diakses oleh seluruh pegawai.

5) Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan

Nilai hasil pengawasan kearsipan adalah indikator yang menunjukkan sejauh mana instansi pemerintah atau lembaga dalam mengelola arsip sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengawasan ini dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk memastikan bahwa pengelolaan arsip berjalan efektif dan efisien pada Inspektorat I

6) Tingkat Penerapan SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan inisiatif strategis pemerintah Indonesia untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, memastikan peningkatan kapabilitas SDM.

7) Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri

Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat I

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan suatu kebijakan pemberdayaan industri yang bertujuan untuk meningkatkan

penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha dan masyarakat serta memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; dan memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri. Capaian ini dihitung untuk belanja diluar belanja pegawai. Secara umum, seluruh belanja telah menggunakan produk dalam negeri, namun nilainya belum dihitung berdasarkan kandungan tiap produk berdasarkan sertifikat TKDN Kemenperin atau realisasi mencapai 100 persen dari target 40 persen. Meskipun demikian pengukuran indikator ini belum dilakukan secara memadai, pengukuran hanya dilakukan pada belanja produk dalam negeri pada belanja (non-pegawai), bukan dihitung untuk tiap produk yang dipakai.

Secara perhitungan indikator pada Triwulan I belum dapat dilakukan perhitungan dikarenakan masih dalam proses pelaksanaan kegiatan, namun secara parsial dapat dikatakan capaian PDN pada Triwulan I adalah 28,39% sesuai dengan realisasi anggaran per 31 Maret 2025.

B. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Sesuai dengan aplikasi e-Monitoring dan monitoring secara manual, realisasi anggaran pada Triwulan I mencapai 14,37% atau sebesar Rp359,133,082,- dari total pagu Rp. 2.500.000.000,- dengan mengesampingkan blokir mandiri sebesar Rp.1.500.000.000,-

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sesuai **aplikasi PP39** sudah mencapai 35,91% atau Rp359.133.082,- dari target 25,00%, sedangkan realisasi fisik sebesar 36,40% dari target fisik sebesar 25,00%.

Dari hasil ini masih terdapat perbedaan perhitungan karena terjadinya perbedaan waktu penginputan pada aplikasi PP39 dan data realisasi e-monitoring. Namun perhitungan sesuai dengan aplikasi sakti telah mencapai 35,91% dari total anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,-. Hasil ini telah memenuhi rencana kegiatan yang ditargetkan sehingga pelaksanaan kegiatan di triwulan II tetap dijalankan sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun.

Realisasi fisik dan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan Inspektorat I dapat dilihat pada Tabel 5. dan Tabel 6.

Tabel 5. Realisasi Fisik dan Keuangan untuk Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat I sesuai Aplikasi PP39

Output	PAGU Anggaran	Triwulan ini			s/d Triwulan ini			Sisa Anggaran s/d Triwulan I		
		Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%
TAK.	2.500.000.000	8,46	359.133.082	14,37	8,46	359.133.082	14,37	91,54	2.140.866.918	85,63

Tabel 6. Realisasi Fisik dan Keuangan untuk Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat I sesuai Aplikasi PP39

Jenis Kegiatan	PAGU Anggaran	Triwulan Ini			sid Triwulan Ini			Sisa Anggaran sid Triwulan I		
		Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%
1 Pelaksanaan Audit Kinerja	773.586.000	34,18	238.401.934,-	30,81	33,34	263.535.934,-	30,81	65,82	535.284.066,-	66,66
2 Reviu pada Satuan kerja Inspektorat I	2.300.000,-	100	2.300.000,-	100	100	2.300.000,-	100	0	0	0
3 Monev SAKIP unit kerja pada Inspektorat I	21.700.000,-	100	21.700.000	100	100	21.700.000	100	0	0	0
4 Consulting dan Pengawalan	196.614.000	44,54	90.997.148,-	46,28	44,54	90.997.148,-	46,28	65,46	100.228.852,-	54,72
5 Penyusunan Pemantauan Evaluasi	5.700.000	41,35	2.300.000	40,35	41,35	2.300.000	40,35	58,65	3.400.000	59,65
Blokir	1.500.000.000									
Total	2.500.000.000,-	12,58	359.133.082	25,09	36,40	359.133.082	35,91	63,60	2.428.635.261,20	74,91

Kegiatan yang telah dilakukan Inspektorat I pada Triwulan I Tahun Anggaran 2025 (Jakarta - Maret 2025) adalah

1. Penugasan audit pada satuan kerja di BPSDMI;
 - a) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI);
 - b) Reviu PIPK TA 2024 pada BPSDMI dan Sekjen;
 - c) Politeknik STTT Bandung;
 - d) Politeknik AKA Bogor;
 - e) SMK – SMAK Bogor;
 - f) SMK – SMTI Bandar Lampung;
 - g) Politeknik ATK Yogyakarta;
 - h) Akademi Komunitas Industri TPT Surakarta;
 - i) SMK – SMTI Yogyakarta;
 - j) Balai Diklat Industri Yogyakarta (BDI Yogyakarta);
 - k) Politeknik STMI Jakarta;
 - l) Politeknik APP Jakarta;
 - m) Balai Diklat Industri Jakarta (BDI Jakarta);
 - n) Politeknik Petrokimia Banten.

Sesuai dengan aplikasi e-Monitoring dan monitoring secara manual, realisasi anggaran pada Triwulan I mencapai 14,37% atau sebesar Rp359,133,082,- dengan mengesampingkan blokir mandiri sebesar Rp.1.500.000.000,-

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sesuai **aplikasi PP39** sudah mencapai 35,91% atau Rp359.133.082,- dari target 25,00%, sedangkan realisasi fisik sebesar 36,40% dari target fisik sebesar 25,00%.

Dari hasil ini masih terdapat perbedaan perhitungan karena terjadinya perbedaan waktu penginputan pada aplikasi PP39 dan data realisasi e-monitoring. Namun perhitungan sesuai dengan aplikasi sakti telah mencapai 35,91% dari total anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,-. Hasil ini telah memenuhi rencana kegiatan yang ditargetkan sehingga pelaksanaan kegiatan di triwulan II tetap dijalankan sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun.

C. Analisis Capaian Kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I sesuai dengan Rencana Aksi Tahun 2025 untuk mendukung sasaran kinerja tergambar dalam tabel sebagai berikut:

RENCANA AKSI INSPEKTORAT I TAHUN 2025

Rencana Aksi Inspektorat Jenderal Tahun 2025						
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Realisasi
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Inspektorat I	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal *) IKU	- Kegiatan Audit, Monev SAKIP, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja oleh pimpinan, Reviu LK-BMN, Pelaksanaan pendampingan/pengawasan kegiatan berisiko tinggi	0,5%	- Kegiatan Audit, Monev SAKIP, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja oleh pimpinan, Reviu LK-BMN, Pelaksanaan pendampingan/pengawasan kegiatan berisiko tinggi	revisi revisi anggaran BPSDMI
						Ir I, II, III, IV, Set Ijen
						Koordinator Arsiparis (Koordinasi TL dan EHP)

Rencana Aksi Inspektorat Jenderal Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Realisasi	Penanggung Jawab	Koordinator
		Penyelesaian Rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2024 Cakupan Tugas Inspektorat I	- Mengumpulkan data hasil audit internal tahun-tahun sebelumnya yang belum selesai tindak lanjutnya. - Koordinasi Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi oleh unit Inspektorat I.	80%	- Memverifikasi penyelesaian rekomendasi: belum selesai, atau tidak dapat diindaklanjuti. - Menyusun laporan berkala (bulanan/triwulanan) terkait capaian penyelesaian.		Ir I, II, III, IV, Set Itjn	Koordinator TL dan EHP

Rencana Aksi Inspektorat Jenderal Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Realisasi	Penanggung Jawab	Koordinator
		Penyelesaian Rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2015 – 2023 Cakupan Tugas Inspektorat I	Menyusun daftar seluruh rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal, revidi, monitoring, evaluasi, dll.) dari tahun 2015 hingga 2023 yang belum ditindaklanjuti atau belum selesai yang dilakukan oleh cakupan tugas Inspektorat I	20%	- Menyampaikan batas waktu dan prioritas penyelesaian sesuai urgensi atau potensi risiko. - Memberikan status akhir terhadap tindak lanjut: valid, tidak sesuai, atau perlu perbalkan.		Ir I, II, III, IV, Set Itjen	Koordinator Arsiparis (Koordinator TL dan EHP)
		Nilai SAKIP	- Mencelaah keseluruhan antara RPJMN/RPJMD, Renstra, Renja, hingga cascading ke level individu (SKP). - Melakukan review atas indikator kinerja utama (IKU)	79.5	Menyelenggarakan pelatihan, bimtek penyusunan dokumen SAKIP bagi seluruh unit kerja Inspektorat I	Memberikan rekomendasi untuk perbaikan target atau realisasi bila ditemukan ketidaksesuaian.	Ir I, II, III, IV, Set Itjen	Auditor

Rencana Aksi Inspektorat Jenderal Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Realisasi	Penanggung Jawab	Koordinator
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	- Melakukan klasifikasi dan pemberian arsip aktif, inaktif, dan permanen sesuai tata naskah dinas. - Menyusun daftar arsip vital, arsip terjaga, dan arsip statis.	61%	Meningkatkan kesadaran seluruh pegawai terhadap pentingnya kearsipan sebagai bagian dari akuntabilitas dan pelayanan publik.		Ir I, II, III, IV, Set Itjen	
		Tingkat Penerapan SPBE	- Mengintegrasikan layanan administrasi pemerintahan, (kepegawaian, keuangan, surat-menyerat, dll.) ke dalam satu portal layanan terpadu seperti Intranet. - Meningkatkan penggunaan aplikasi umum (seperti SRIKANDI, e-Office, e-SAKIP, e-Monev, e-Kinerja) secara optimal.	80%	- Menentukan Indikator Penerapan SPBE - Pembentukan Im SPBE	Pembahasan Indikator Tingkat Penerapan SPBE	Ir I, II, III, IV dan ses Itjen	Kasubag TU tiap Inspektorat

Rencana Aksi Inspektorat Jenderal Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Realisasi	Penanggung Jawab	Koordinator
		Presentase nilai capaian Penggunaan Produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Inspektorat I	- Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Inspektorat Jenderal	91%	Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal	Sesuai dengan tata cara penghitungan pada triwulan I sebesar 359,133,082 dengan sisa	Ir I, II, III, IV, Set Itjen	Kepala Bagian Umum

Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Inspektorat I Triwulan I Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 7. Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat I dalam Perjanjian Kinerja

KODE	SASARAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN		TARGET	Realisasi
TJ	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Inspektorat I	1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Cakupan Tugas Inspektorat I	0,5	Belum dapat dihitung
		2	Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan (audit) Internal Tahun 2024 Cakupan Tugas Inspektorat I	80	Belum dapat dihitung
		3	Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan (audit) Internal Tahun 2015-2023 Cakupan Tugas Inspektorat I	20	Belum dapat dihitung
		4	Nilai SAKIP	79,5	Belum dapat dihitung
		5	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	61	Belum dapat dihitung
		6	Tingkat Penerapan SPBE	80	Belum dapat dihitung
		7	Presentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan / atau Jasa Pemerintah	91	Belum dapat dihitung

D. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I, terdapat hambatan dan kendala sebagai berikut:

1. Tidak semua kegiatan dapat mendukung kinerja dikarenakan adanya, sehingga pencapaian kinerja tidak berdampak secara signifikan terhadap kinerja Inspektorat Jenderal.
2. Terdapat penugasan di luar pelaksanaan PKPT yang mengakibatkan berkurangnya tenaga auditor untuk menyelesaikan rencana PKPT sehingga pelaksanaannya sering mundur dari jadwal sebelumnya namun tidak berdampak pada pelaksanaan PKPT;

pelaksanaannya sering mundur dari jadwal sebelumnya namun tidak berdampak pada pelaksanaan PKPT;

3. Anggaran yang tersedia tidak dapat memenuhi kegiatan pendukung sasaran kinerja sehingga hanya bersifat mandatory dan prioritas kegiatan berisiko;

E. Langkah Tindak Lanjut

Langkah tindak lanjut atas hambatan dan kendala yang dihadapi pada triwulan I untuk meningkatkan kinerja Inspektorat I adalah melalui peningkatan kerjasama yang sinergis antara lain :

1. Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.;
2. Membudayakan pengendalian risiko ke seluruh satuan kerja sehingga memudahkan pelaksanaan pengawasan.
3. Menerapkan prosedur pengawasan yang berbasis sistem informasi di Inspektorat Jenderal.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data laporan kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara umum target realisasi keuangan dan kinerja pada TW I telah tercapai;
2. Realisasi anggaran pada Triwulan I mencapai 14,37% atau Rp359.133.082,- dengan mengesampingkan blokir mandiri sebesar Rp.1.500.000.000,- dari total Pagu Rp. 2.500.000.000
3. Rencana kegiatan yang ditargetkan sehingga pelaksanaan kegiatan di triwulan II tetap dijalankan sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun.

B. Saran

Kerjasama dan koordinasi sinergi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat I baik internal maupun eksternal perlu lebih ditingkatkan untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai dengan baik oleh Inspektorat I.

Demikian Laporan Inspektorat I periode Triwulan I Tahun 2025 untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN – I
TAHUN ANGGARAN 2025 INSPEKTORAT I

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2025
INSPEKTORAT I

I. DATA UMUM

1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi

2. Nomor Kode dan Nama Fungsi

3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi

4. Nomor Kode dan Nama Program

5. Indikator Hasil

6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan

7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke

8. Penanggung Jawab Kegiatan

9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan

10. Nomor Surat Pengesahan DIPA
- : (247885) INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

: 04. Ekonomi

: 04.07. Industri Dan Konstruksi

: 04.07.WA. Program Dukungan Manajemen

: 1841 - Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspe

: 1/1

: Dewi Setiawati, ST, M. SE

: Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt. 5

: SP DIPA- 019.06.1.247885/2025

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

Nomor Kode dan Nama Output	No. Loan	Anggaran (Rp. 000)			Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
		PHLN	Rupiah	Total		
1	2	3	4	5	6	7
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal		-	2.500.000	2.500.000		194 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi
Total		-	2.500.000	2.500.000		

Jakarta Selatan, April 2025

Inspektur I Inspektorat Jenderal



Dewi Setiawati, ST, M. SE

TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

Output	S.D. Triwulan Lalu (%)						Triwulan Ini (%)						S.D. Triwulan Ini (%)						Lokasi Kegiatan
	Keuangan			Fisik			Keuangan			Fisik			Keuangan			Fisik			
	S	R	S	S	R	S	S	R	S	S	R	S	S	R	S	S	R		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1																		14	
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	10,52	14,21	14,54	13,22	10,52	14,54	14,54	13,22	10,52	14,54	14,54	13,22	10,52	14,54	14,54	13,22	10,52	DKI JAKARTA	
Jumlah	10,52	14,21	14,54	13,22	10,52	14,54	14,54	13,22	10,52	14,54	14,54	13,22	10,52	14,54	14,54	13,22	10,52		

Jakarta Selatan, April 2025
Inspektur I Inspektorat Jenderal

Dewi Setiawati, ST, M. SE

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Output	Kendala	Tindak Lanjut yang Dipertukan	Plhak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1	2	3	4	5
	-	TIDAK ADA KENDALA	-	-

Jakarta Selatan, April 2025
Inspektur I Inspektorat Jenderal



Dewi Setiawati, ST, M. SE